

PERAN DINAS PERTANIAN DALAM PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DI KABUPATEN BIMA NUSA TENGGARA BARAT

Wiwing Anggrianingsih^{1*}, Andi Rosdianti Razak², Anwar Parawangi³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to determine the role of the agricultural service in the program to improve the welfare of farmers in the district of West Nusa Tenggara. The type of research used qualitative research. The number of informants in this study was 3 people. Data collection used 1 observation, interviews with a number of informants such as; the head of the agriculture department, the head of the farmer group and the community. The technique of checking the validity of the data used triangulation, the method triangulation. The data analysis technique used interactive analysis. The results of this study showed that the role of the agricultural service in the program to improve the welfare of farmers in the district of West Nusa Tenggara was good, this was proved by the existence of more advanced developments such as providing technology packages, conducting demonstrations or examples of the use of agricultural technology tools. In this case, farmers used to use traditional tools such as hoe, but now they used tractors. encouraging farmer groups to increase agricultural production, for example they chose superior seeds, subsidized fertilizers, as well as medicines so that the yields obtained increased rapidly without any obstacles.

Keywords: *community welfare improvement program*

Abstrak

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dinas pertanian dalam program peningkatan kesejahteraan petani di kabupaten bima nusa tenggara barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 3 orang. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan adalah kepala dinas pertanian, kepala kelompok tani dan masyarakat. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi yaitu triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Hasil penelitian ini, peran dinas pertanian dalam program peningkatan kesejahteraan petani di kabupaten bima nusa tenggara barat sudah baik, hal ini dilihat dengan adanya perkembangan yang lebih maju seperti menyediakan paket-paket teknologi, melakukan demonstrasi atau contoh penggunaan alat teknologi pertanian. Dalam hal ini zaman dulu petani masih menggunakan alat-alat tradisional seperti cangkul sedangkan sekarang sudah menggunakan traktor. mendorong kelompok tani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, contohnya mereka memilihkan bibit yang unggul, pupuk yang bersubsidi, juga obat-obatan sehingga hasil produksi yang diperoleh akan meningkat pesat tanpa adanya hambatan

Kata Kunci: program peningkatan kesejahteraan masyarakat

* wiwing@gmail.com

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting peranannya dalam perekonomian di sebagian negara-negara yang sedang berkembang. Hal tersebut bisa kita lihat jelas dari peranan sektor pertanian dalam menampung penduduk serta memberikan kesempatan kerja kepada penduduk. Pembangunan pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih baik, sekalipun prioritas pada kebijaksanaan industrialisasi sudah dijatuhkan, namun sektor pertanian dapat memiliki kemampuan untuk menghasilkan surplus. Hal ini terjadi bila produktivitas diperbesar sehingga menghasilkan pendapatan petani yang lebih tinggi dan memungkinkan untuk menabung dan mengakumulasi modal. Peningkatan taraf hidup tersebut diperoleh petani dengan cara meningkatkan pendapatannya. Untuk memperoleh pendapatan yang tinggi mereka melaksanakan beberapa kegiatan dengan mengembangkan berbagai kemungkinan komoditi pertanian lain (diversifikasi usaha tani) yang secara ekonomis menguntungkan lahan pertaniannya memungkinkan. Pengembangan pendapatan di luar usaha tani (offfarm income) juga akan sangat membantu peningkatan

kesejahteraan karena terbatasnya potensi usaha tani, berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan sektor pertanian akan mampu menurunkan angka kemiskinan petani (Sudirman, 1989).

Pertanian di Indonesia hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dapat kita lihat dari kesejahteraan para petani dan pendapatan Nasional yang dihasilkan dari sektor ini. Padahal potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, selain itu bagian pendapatan Nasional yang cukup besar, besarnya ekspor Nasional, dan sebenarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, dan juga peranan petani yang menyediakan pangan bagi masyarakat.

Sektor pertanian merupakan sektor yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Oleh karena itu pengembangan dan pembinaannya harus terus dilakukan oleh pemerintah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kepercayaan diri bagi pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Pertanian tanaman pangan Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Untuk melakukan pembinaan, pelaksanaan dan kerja teknis pada

masyarakat terutama pada masyarakat petani.

Para ahli menyatakan bahwa secara umum pengertian Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Barbara (1995:21), menyatakan bahwa peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik.

Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut. peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat.

Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku.

Menurut Poerwadarminta (1996), pengertian peran adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan peristiwa yang melatarbelakanginya. Peristiwa tersebut bisa dalam hal baik dan hal buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk bertindak.

Menurut Soekanto (2012), arti peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda.

Menurut Mifta Thoha (2002), peran adalah serangkaian perilaku seseorang yang dilakukan berdasarkan dengan karakternya. Kondisi ini bisa dilatarbelakangi oleh psikologi seseorang setiap melakukan tindakan yang diinginkan, sesuai kata hatinya. Setiap sistem perekonomian, apakah itu sistem perekonomian kapitalis atau sistem perekonomian sosialis, pemerintah senantiasa

mempunyai peranan yang penting. Peran pemerintah sangat besar dalam perekonomian sosialis dan sangat terbatas dalam perekonomian kapitalis murni, seperti dalam sistem kapitalis yang dikemukakan oleh Adam Smith.

Menurut Dumairy (1996) peranan pemerintah dapat dibedakan menjadi empat kelompok yaitu : a) Peran alokatif, yaitu peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan efisiensi produksi, b) Peran distributive, yaitu peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar, c) Peran stabilisasi, yaitu peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya, d) Peran dinamisatif, yaitu peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Menurut Moeljarto dan Prabowo (1997), terdapat 3 (tiga) kategori makna pembangunan sosial, yaitu : a) Pembangunan sosial sebagai pengadaan pelayanan masyarakat. Pembangunan sosial diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pendidikan, kesehatan, pangan, sandang, dan perumahan. dalam hal ini pemerintah cenderung menempatkan

manusia sebagai aktor yang harus pasif menerima pelayanan apapun yang diberikan oleh birokrasi pemerintahan sesuai dengan kebijaksanaan mereka dengan cara, waktu, dan tempat yang telah yang telah ditentukan oleh demokrasi sehingga konsep ini mendekati metode konvensional top down yang bercirikan charity strategy, b) Pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana untuk mencapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi dalam hal ini tidak hanya menekankan aspek pelayanan sosial saja. Tujuan utama pembangunan sosial adalah melibatkan setiap pribadi dalam proses pembebasan dirinya sendiri dari setiap bentuk dan dominasi atau tekanan sehingga setiap individu dapat tumbuh secara lengkap dalam hubungannya dengan orang lain, dan c) Pembangunan sosial sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk bertindak. Disini meliputi suatu usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia untuk mengarahkan minat mereka ikut serta dalam proses pembentukan keputusan mengenai berbagai hal yang memiliki dampak pada mereka maupun bagi penerapan keputusan tersebut.

Dalam proses pembangunan tidak terlepas dari beberapa indikator yang tercantum dalam 5 (lima) peran

pemerintah untuk pembangunan (Siagian, 2000), antara lain: a) Peran sebagai Fasilitator, yaitu pemerintah harus mampu menciptakan adanya keadaan politik sosial dan ekonomi yang stabil dan mantap, b) Peran sebagai innovator, adalah kemampuan menterjemahkan program pembangunan daerah dengan bahasan yang sederhana serta menggugah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam bidang pembangunan, c) Peran sebagai modernisator, yaitu pemerintah bertuga untuk mengiring masyarakat kearah kehidupan modern, yaitu kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dan kemahiran , menejerial, kemampuan mengolah kekayaan alam, memiliki sistem pendidikan nasional yang andal sehingga mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang produktif, memiliki landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, meiliki visi yang jelas tentang masa depan rakyat maupun mengambil keputusan yang rasional tentang nasibnya, bersedia mengambil resiko dan orientasi masa depan, serta bersedia menerima perubahan, d) Peran sebagai palopor, pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi seluruh masyarakat, baik buruknya perilaku yang dipraktikan oleh orang-orang yang berada dilembaga

pemerintahan juga memberikan pengaruh besar terhadap psikologi masyarakat yang meihat dan memahaminya. Karena ketika pemerintah mengeluarkan statement akan suatu (dilarang korupsi) tetapi mereka (orang-orang parlement) yang melakukan hal tersebut sehingga pada akhirnya muncul rasa ketidakpercayaan antara masyarakat dengan pemerintah, e) Peran sebagai pelaksanaan diri, pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggungjawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagaia pertimbangan seperti keselamatan Negara, modal yang terbatas, kemampuan yang masih belum memadai. Pemerintah Daerah dalam bidang Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan berdasarkan asas otonomi daerah.

Dalam hal ini tugas pokok tersebut diterjemahkan sebagai urusan Pemerintahan Kabupaten Bima dalam bidang Pertanian dan Perkebunan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bima Nomor 30 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Bima. Dinas Pertanian dan Perkebunan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial

Kemasyarakatan serta pada umumnya dalam bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas Penyelenggaraan sebagaimana urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan asas otonomi daerah. Dinas Pertanian memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan usaha pertanian. Dengan dukungan yang baik dari Dinas Pertanian, Masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari bertani akan hidup semakin layak dan makmur. Perlu peran aktif dari setiap bagian di dalam Dinas Pertanian untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian yang dibutuhkan kepada penelitian ini kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Lokasi penelitian berada di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bima, karena peneliti melihat bahwa sektor pertanian yang ada Kabupaten Bima semakin menurun. Bantuan bibit dan pupuk untuk masyarakat masih sangat terbatas dan setiap kali ada bibit termasuk biasanya

jumlah bibit yang dibagikan tidak sesuai dengan luas lahan masyarakat, sehingga kebanyakan masyarakat membeli bibit jagungnya di toko-toko.

Sumber data dalam penelitian ada 2 (dua), yaitu : a) Data primer yang diperoleh secara langsung dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan Peran Dinas Pertanian Dalam Program Peningkatan Kesejahteraan Petani di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, b) Data Sekunder yang diperoleh dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari data tertulis sebagai bukti penelitian.

Adapun sumber Data sekunder yang digunakan penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi buku-buku berkaitan dengan Peran Dinas Pertanian Dalam Program Peningkatan Kesejahteraan Petani di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Penelitian mengenai Peran Dinas Pertanian Dalam Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat dalam sektor pertanian yang ada di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini memerlukan informasi yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian

guna memberikan data dan informasi yang akurat dan dapat di percaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bima merupakan salah satu daerah tonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terletak di ujung timur dari pulau Sumbawa bersebelahan dengan kota bima (pecah dari kota bima). Secara geografis kabupaten bima berada pada posisi 117⁰40"-119⁰10" Bujur Timurdan 70⁰30" Lintang selatan.

Secara topografis wilayah kabupaten bima sebagai besar (70%) merupakan dataran tinggi bertekstur pegunungan sementara sisanya (30%) adalah dataran. Sekitar 14% dari proposi dataran rendah tersebut merupakan areal persawahan dan lebih dari separuh merupakan lahan kering. Oleh karena keterbatasan lahan kering. Oleh karena keterbatasan lahan pertanian seperti itu dan dikaitkan pertumbuhan penduduk kedepan akan menyebabkan daya dukung arahan semakin sempit. Konsekuensinya diperlukan transformasi dan reorientasi basis ekonomi dari pertanian tradisional pertanian wirausaha dan sector industry kecil dan perdagangan. Dilihat dari ketinggian permukaan laut, kecamatan donggo merupakan daerah tertinggi dengan ketinggian 500 m dari permukaan laut, sedangkan daerah yang

terendah adalah kecamatan sape dan sanggar yang mencapai ketinggian hanya 5m dari permukaan laut.

Kabupaten Bima memiliki Luas wilayah setelah membentuk daerah Kota Bima berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 adalah seluas 437.465 Ha atau 4.394,38 km² (Sebelum pemekaran 459.690 Ha atau 4.596,90 km²) dengan jumlah penduduk 473,890 jiwa. Dengan kepadatan rata-rata 96 Jiwa/ Km².

Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah terukir sejak tahun 1958. Sebelumnya, wilayah ini masuk ke dalam wilayah Negara Indonesia Timur saat Negara Indonesia masih berupa Negara Republik Indonesia Serikat. Setelah adanya pengakuan atas kedaulatan Negara Indonesia, provinsi ini menjadi bagian dari Provinsi Sunda Kecil. Keberadaan status provinsi, bagi NTB tidak datang dengan sendirinya. Perjuangan menuntut terbentuknya Provinsi NTB berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Provinsi NTB, sebelumnya sempat menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur dalam konsepsi Negara Republik Indonesia Serikat, dan menjadi bagian dari Provinsi Sunda kecil setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia.

Seiring dinamika zaman dan setelah mengalami beberapa kali proses perubahan sistem ketatanegaraan pasca diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia, barulah terbentuk Provinsi NTB. NTB, secara resmi mendapatkan status sebagai provinsi sebagaimana adanya sekarang, sejak tahun 1958, berawal dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT, dan yang dipercayakan menja di Gubernur pertamanya adalah AR. Moh. Ruslan Djakraningrat. Dinas Pertanian dan Perkebunan merupakan OPD yang dibentuk berdasarkan Perda No 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah dan Perbub no 30 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah.

Sebelumnya pada tahun anggaran 2016, Dinas Pertanian dan Perkebunan berstatus sebagai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang secara spesifik menaungi urusan Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura. Terhitung sejak Bulan Januari 2017, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Beralih menjadi Dinas Pertanian dan Perkebunan yang

membidangi urusan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan Pertanian. Oleh karena itu dalam rangka memenuhi akuntabilitas implementasi program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2016, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima sepanjang tahun LKjIP Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2016 berisi gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategis yang dilaksanakan pada Tahun 2016, yang merupakan capaian kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Starategis (Renstra).

Visi Terwujudnya pertanian dan perkebunan yang tangguh menuju kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Misi Mendukung ketahanan dan kemandirian pangan nasional melalui peningkatan ketersediaan komoditas tanaman pangan utama dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan merupkan prinsip pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Mendukung tercapai kesejahteraan

petani pada supsektor pertanian dan perkebunan melalui peningkatan nilai tambah, mutu dan daya saing produk pertanian dan perkebunan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pertanian di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat yaitu: a) Sarana Gedung kantor memiliki 11 ruangan dengan tambahan 1 ruangan tunggu, 1 ruangan aula, 1 ruangan gudang, 3 wc, b) Prasarana Gedung kantor Dinas Pertanian di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat memiliki prasarana di antaranya 11 kursi pejabat, 11 meja pejabat, 12 lemari, 15 meja kayu, 15 kursi besi, 20 kursi plastik, 5 AC, 10 kipas angin, 12 komputer, 12 printer, 2 dispenser, 2 telpon kantor.

Peran Fasilitator

Fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Fasilitator bukanlah seseorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan nasihat atau pendapat. Fasilitator harus menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mencari dan menemukan program yang sesuai dengan kebutuhan petani di

Kabupaten Bima. Dinas pertanian Kabupaten Bima Dalam perannya sebagai fasilitator memberikan fasilitas yang di butuhkan oleh petani sebagai bahan untuk kemudian memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan atau petani.

Berdasarkan jawaban dan pernyataan dari narasumber, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pertanian dalam membantu peningkatan Kesejahteraan Petani di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat sudah dikatakan maksimal sejauh yang peneliti pantau dilapangan, selain memberikan bantuan berupa benih, pupuk maupun obat-obatan untuk pemberantasan hama.

Dinas pertanian kabupaten Bima sebagai dinas yang di prioritaskan dengan bidang pertanian menyelenggarakan penyuluh di seluruh wilayah Kabupaten Bima secara merata sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagai dinas guna untuk meberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan para petani.

Dalam melaksanakan tugas sebagai Fasilitator baik dalam menyampaikan materi pelatihan, memberikan bimbingan atau diskusi, terdapat teknik-teknik sebagai berikut.

Maksud pencairan suasana adalah agar suasana diskusi kelompok menjadi

tenang, nyaman, santai dan tidak beku/tegang. Maka Fasilitator harus memperlihatkan raut wajah yang ramah, banyak senyum serta dalam memberikan contoh atau celetukan yang lucu tetap dalam suasana terkendali. Waktu untuk pencairan suasana cukup maksimal 10 menit, dan hal ini dilakukan pada saat pertemuan pertama.

Peran Penting Lainnya Selain berperan sebagai pemandu proses, Fasilitator memiliki peran penting lainnya sebagai Tool Giver atau pemberi alat Bantu. Untuk memudahkan sebuah proses mencapai tujuannya, fasilitator bisa menciptakan atau membuat alat-alat Bantu sederhana agar proses dialaog atau diskusi menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Biasanya alat-alat Bantu itu berupa pertanyaan-pertanyaan kunci yang sederhana dan bisa membantu peserta mulai saling berdialog dan berdiskusi. Selain sebagai pemberi alat bantu, peran fasilitator juga sebagai process educator.

Peran Inovator

Seorang inovator selalu mengamati suatu gagasan, barang, atau metode yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Mereka adalah pengamat yang handal, karena sambil mengamati mereka berpikir untuk mencari tahu apa yang masih kurang

dan dapat dikembangkan dari inovasi yang telah ada. Mereka selalu mencari cara untuk membuat inovasi yang semakin memudahkan manusia dalam beraktivitas. Hal ini juga yang membuat mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi karena mereka selalu mempertanyakan apa yang ada dan dilakukan oleh orang sekitar.

Kita tahu bahwa setiap tindakan yang kita lakukan sehari-hari saja tidak jarang mengandung resiko, apalagi bagi seorang inovator. Seorang inovator adalah mereka yang berani mengambil resiko. Mereka siap dengan segala eksperimen beserta segala risikonya. Karena menurut mereka, keberhasilan sangat dipengaruhi oleh semangat yang tinggi. Keberanian dibutuhkan oleh seorang inovator karena akan menghindarkan mereka dari keterpurukan dan keputusan. Mereka akan berfikir positif dengan membayangkan kesuksesannya di masa depan hingga termotivasi untuk bekerja lebih giat dan tidak mudah putus asa.

Dinas Pertanian Kabupaten Bima merupakan salah satu unsur pemerintahan di kabupaten Bima. Dinas Pertanian Kabupaten Pelalawan memiliki tanggung jawab membina dan mengembangkan para petani dalam mengelolah lahannya sehingga dapat tercapai masyarakat petani yang

sejahtera. Peranan Dinas Pertanian Kabupaten Bima dalam menentukan program kegiatan yang tepat sasaran.

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai inovator, dinas pertanian kabupaten Bima harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga penyuluh pertanian dan mengembangkan model-model pembelajaran pertanian yang inovatif.

Dinas Pertanian selaku organisasi pemerintahan sekaligus sebagai supervisor seharusnya secara langsung memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penyuluh dan masyarakat atau para petani lainnya untuk meningkatkan kualitas dalam proses pertanian. Seiring dengan tuntutan masyarakat mengenai pentingnya kebutuhan pertanian yang inovatif, akhir-akhir ini berkembang konsep pertanian modern, misalnya bibit yang unggul, pemilihan lahan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan bibit tani, model bercocok tanam, pemupukan yang sesuai dengan bibit dan kesuburan tanah, dan seterusnya.

Konsep-konsep pertanian modern tersebut merupakan gambaran betapa kebutuhan pertanian merupakan salah

satu pekerjaan yang menjadi prioritas masyarakat menjadikan pertanian sebagai bahan utama untuk merespon kebutuhan pertanian yang unggul pada era modernisasi saat ini.

Dinas Pertanian Kabupaten Bima merupakan institusi yang spesifik dari perangkat fungsi-fungsi yang mendasar dalam melayani masyarakat dalam bidang pertanian. Keberhasilan dalam menciptakan hasil pertanian yang bermutu akan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pendapatan masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dalam kata lain mencapai kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kabupaten Bima, yang selanjutnya akan meningkatkan mutu pertanian yang akan menjadimodal utama untuk berdayasaing di era globalisasi.

Peran Modernisator

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-

harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Pelaksanaan semua program dan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan antar OPD lainnya, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing OPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, difasilitasi melalui Forum OPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bima.

Peran Pelopor

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Bima sudah melakukan penyuluhan terhadap para petani, mereka mendirikan penyuluhan dilapangan yaitu sekolah

lapang untuk memudahkan petani untuk mendapatkan ilmu tentang bertani.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Pertanian mengacu Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan Diri

Dalam peran ini, pemerintah bertugas melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan Negara, modal yang terbatas, kemampuan yang masih belum memadai.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa peran dalam membantu masyarakat tani mendapatkan akses dengan Dinas Pertanian sudah terlaksana. Melalui UPT Pertanian di setiap kecamatan akan membantu masyarakat tani untuk mendapatkan akses langsung dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bima.

Karena itu salah satu akses agar masyarakat tidak melakukan jarak tempuh yang terlalu jauh untuk mencapainya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Bima sangat berperan penting bagi kesejahteraan masyarakat khusus petani. Adapun 5 peran Dinas Pertanian yang sudah dikatakan sesuai dengan harapan masyarakat diantaranya peran fasilitator, dimana pemerintah dalam membantu masyarakat petani mendapatkan hasil produksi yang baik pemerintah sudah memberikan bantuan berupa bibit, pupuk maupun obat-obatan untuk membasmi hama penyakit tanaman. Kedua, peran inovator dimana pemerintah dalam mendorong kelompok petani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, contohnya mereka memilihkan bibit yang unggul, pupuk yang bersubsidi, juga obat-obatan sehingga hasil produksi yang diperoleh akan meningkat pesat tanpa adanya hambatan. Ketiga, peran modernisator dimana peran pemerintah dalam mendorong petani untuk mau menggunakan teknologi baru. Dalam

mendorong masyarakat petani, pemerintah telah menyediakan alat teknologi untuk bertani contohnya hand traktor, traktor besar, alat menggiling, alat mencangkul dan sebagainya. Keempat, peran pelopor yaitu pemerintah memberikan pelatihan terhadap petani saat melakukan penyuluhan. Dalam hal tersebut pemerintah sudah menyediakan sekolah lapang untuk memudahkan masyarakat petani untuk belajar tentang bertani yang baik. Selanjutnya, peran pelaksanaan diri dalam membantu kelompok petani mendapatkan akses dengan Dinas Pertanian. Dalam hal ini mereka telah menyediakan UPT Pertanian setiap kecamatan untuk memudahkan petani untuk mendapatkan akses langsung dengan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Barbara, Robberta H. 1998. *Science in The Multicultural Classroom, A Guide to Teaching and Learning*. Second Edition. Boston: Allyn and Bacon.
- Desy Natasya. 2019. *Peran Penyuluh Pertanian dalam Pengembangan Kelompok Tani Tanaman Hortikultural di Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli*. Skripsi. Program Studi Agribisnis Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro.

- Irhamisyah. 2017. *Peranan Balai Penyuluhan Kecamatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone*. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta. Gramedia.
- Siagian, P Sondang. 2000. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudirman, B. 1989. *Efisiensi Penggunaan Faktor Produksi Dalam Usaha Tani di Kabupaten Sidenreng Rappang: pendekatan ekonometri*. Tesis.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Karata: Gramedia Pustaka Utama.
- Sunarti. 2015. *Peranan Dinas Pertanian (Diperta) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan*. Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Unmul.
- Sri Jusnaeni. 2017. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sektor Pertanian di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto*. Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
- Thoha, Miftah. 2002. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.